



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum daerah provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2010;
- b. bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 pada tanggal 17 September 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (2) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten dan kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2010 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

(4) Proporsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal daerah provinsi, kabupaten, dan kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

(5) Kapasitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten dan kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Dana Alokasi Umum untuk 10 (sepuluh) daerah induk masih termasuk alokasi Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekarannya.
- (2) Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data.
- (3) 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong.
- (4) 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.
- (5) Dana Alokasi Umum untuk 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



T. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2009
TANGGAL 7 DESEMBER 2009

**RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010**

(rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	621.431.612.000
2.	Kab. Aceh Barat	311.356.765.000
3.	Kab. Aceh Besar	394.817.978.000
4.	Kab. Aceh Selatan	327.447.177.000
5.	Kab. Aceh Singkil	213.928.289.000
6.	Kab. Aceh Tengah	316.232.601.000
7.	Kab. Aceh Tenggara	302.145.355.000
8.	Kab. Aceh Timur	363.251.777.000
9.	Kab. Aceh Utara	245.998.105.000
10.	Kab. Bireun	392.798.466.000
11.	Kab. Pidie	425.166.519.000
12.	Kab. Simeulue	218.813.604.000
13.	Kota Banda Aceh	328.073.282.000
14.	Kota Sabang	213.091.527.000
15.	Kota Langsa	233.374.492.000
16.	Kota Lhokseumawe	253.964.760.000
17.	Kab. Nagan Raya	291.226.672.000
18.	Kab. Aceh Jaya	202.847.293.000
19.	Kab. Aceh Barat Daya	233.168.314.000
20.	Kab. Gayo Lues	241.585.340.000
21.	Kab. Aceh Tamiang	244.270.545.000
22.	Kab. Bener Meriah	235.968.764.000
23.	Kota Subulussalam	163.055.995.000
24.	Kab. Pidie Jaya	218.322.708.000

25. Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	DAERAH	JUMLAH
25.	Provinsi Sumatera Utara	813.233.489.000
26.	Kab. Asahan	479.299.307.000
27.	Kab. Dairi	336.864.702.000
28.	Kab. Deli Serdang	793.141.685.000
29.	Kab. Tanah Karo	401.710.290.000
30.	Kab. Labuhan Batu	315.309.299.000
31.	Kab. Langkat	628.952.504.000
32.	Kab. Mandailing Natal	398.482.296.000
33.	Kab. Nias	418.547.198.000
34.	Kab. Simalungun	644.610.865.000
35.	Kab. Tapanuli Selatan	334.737.772.000
36.	Kab. Tapanuli Tengah	313.957.675.000
37.	Kab. Tapanuli Utara	369.275.117.000
38.	Kab. Toba Samosir	280.449.853.000
39.	Kota Binjai	293.536.658.000
40.	Kota Medan	784.139.518.000
41.	Kota Pematang Siantar	313.941.731.000
42.	Kota Sibolga	220.076.802.000
43.	Kota Tanjung Balai	241.921.536.000
44.	Kota Tebing Tinggi	228.057.807.000
45.	Kota Padang Sidempuan	270.129.118.000
46.	Kab. Pakpak Bharat	167.780.345.000
47.	Kab. Nias Selatan	277.887.323.000
48.	Kab. Humbang Hasundutan	279.893.022.000
49.	Kab. Serdang Bedagai	404.835.802.000
50.	Kab. Samosir	243.041.606.000
51.	Kab. Batu Bara	337.663.207.000
52.	Kab. Labuhan Batu Utara	303.657.733.000
53.	Kab. Labuhan Batu Selatan	253.282.238.000
54.	Kab. Padang Lawas Utara	243.565.554.000
55.	Kab. Padang Lawas	241.106.688.000

56. Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	DAERAH	JUMLAH
56.	Provinsi Sumatera Barat	661.617.385.000
57.	Kab. Limapuluh Kota	411.513.040.000
58.	Kab. Agam	435.507.286.000
59.	Kab. Kepulauan Mentawai	287.489.909.000
60.	Kab. Padang Pariaman	417.865.290.000
61.	Kab. Pasaman	323.271.519.000
62.	Kab. Pesisir Selatan	454.097.271.000
63.	Kab. Sijunjung	291.098.176.000
64.	Kab. Solok	390.172.286.000
65.	Kab. Tanah Datar	390.379.990.000
66.	Kota Bukit Tinggi	242.306.440.000
67.	Kota Padang Panjang	203.676.353.000
68.	Kota Padang	632.117.457.000
69.	Kota Payakumbuh	246.791.255.000
70.	Kota Sawahlunto	202.073.979.000
71.	Kota Solok	210.134.688.000
72.	Kota Pariaman	236.689.036.000
73.	Kab. Pasaman Barat	338.852.414.000
74.	Kab. Dharmasraya	258.494.990.000
75.	Kab. Solok Selatan	232.434.248.000
76.	Provinsi Riau	58.869.157.000
77.	Kab. Bengkalis	-
78.	Kab. Indragiri Hilir	363.153.409.000
79.	Kab. Indragiri Hulu	220.101.763.000
80.	Kab. Kampar	134.527.917.000
81.	Kab. Kuantan Singingi	248.122.805.000
82.	Kab. Pelalawan	181.409.001.000
83.	Kab. Rokan Hilir	-
84.	Kab. Rokan Hulu	202.101.992.000

85. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	DAERAH	JUMLAH
85.	Kab. Siak	-
86.	Kota Dumai	87.732.997.000
87.	Kota Pekanbaru	280.283.932.000
88.	Provinsi Kepulauan Riau	310.161.843.000
89.	Kab. Bintan	110.234.609.000
90.	Kab. Natuna	-
91.	Kab. Karimun	77.105.581.000
92.	Kota Batam	230.164.681.000
93.	Kota Tanjung Pinang	185.955.885.000
94.	Kab. Lingga	133.600.054.000
95.	Kab. Kepulauan Anambas	213.045.068.000
96.	Provinsi Jambi	489.069.421.000
97.	Kab. Batanghari	283.646.310.000
98.	Kab. Bungo	311.791.251.000
99.	Kab. Kerinci	327.334.925.000
100.	Kab. Merangin	352.586.125.000
101.	Kab. Muaro Jambi	307.111.978.000
102.	Kab. Sarolangun	303.551.450.000
103.	Kab. Tanjung Jabung Barat	210.222.085.000
104.	Kab. Tanjung Jabung Timur	239.705.236.000
105.	Kab. Tebo	285.582.492.000
106.	Kota Jambi	379.188.874.000
107.	Kota Sungai Penuh	239.040.161.000
108.	Provinsi Sumatera Selatan	512.083.577.000
109.	Kab. Lahat	343.899.611.000
110.	Kab. Musi Banyuasin	80.256.489.000
111.	Kab. Musi Rawas	333.676.280.000

112. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	DAERAH	JUMLAH
112.	Kab. Muara Enim	371.879.096.000
113.	Kab. Ogan Komering Ilir	541.732.260.000
114.	Kab. Ogan Komering Ulu	298.400.575.000
115.	Kota Palembang	696.587.039.000
116.	Kota Pagar Alam	180.686.936.000
117.	Kota Lubuk Linggau	209.945.644.000
118.	Kota Prabumulih	188.426.720.000
119.	Kab. Banyuasin	451.230.547.000
120.	Kab. Ogan Ilir	288.392.166.000
121.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	382.017.919.000
122.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	261.025.113.000
123.	Kab. Empat Lawang	192.693.778.000
124.	Provinsi Bangka Belitung	410.811.433.000
125.	Kab. Bangka	272.130.207.000
126.	Kab. Belitung	238.551.941.000
127.	Kota Pangkal Pinang	236.693.742.000
128.	Kab. Bangka Selatan	226.695.596.000
129.	Kab. Bangka Tengah	204.185.915.000
130.	Kab. Bangka Barat	217.122.438.000
131.	Kab. Belitung Timur	223.608.599.000
132.	Provinsi Bengkulu	523.041.290.000
133.	Kab. Bengkulu Selatan	285.481.509.000
134.	Kab. Bengkulu Utara	327.441.782.000
135.	Kab. Rejang Lebong	333.093.797.000
136.	Kota Bengkulu	351.461.812.000
137.	Kab. Kaur	218.613.498.000
138.	Kab. Seluma	257.750.821.000
139.	Kab. Mukomuko	249.926.507.000

140. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	DAERAH	JUMLAH
140.	Kab. Lebong	218.618.650.000
141.	Kab. Kepahiang	234.497.386.000
142.	Kab. Bengkulu Tengah	208.427.792.000
143.	Provinsi Lampung	643.748.209.000
144.	Kab. Lampung Barat	347.589.688.000
145.	Kab. Lampung Selatan	505.873.706.000
146.	Kab. Lampung Tengah	706.861.755.000
147.	Kab. Lampung Utara	470.729.922.000
148.	Kab. Lampung Timur	543.770.666.000
149.	Kab. Tanggamus	582.589.357.000
150.	Kab. Tulang Bawang	494.748.737.000
151.	Kab. Way Kanan	312.904.886.000
152.	Kota Bandar Lampung	539.267.568.000
153.	Kota Metro	232.383.370.000
154.	Kab. Pesawaran	337.193.436.000
155.	Provinsi DKI Jakarta	-
156.	Provinsi Jawa Barat	1.086.123.940.000
157.	Kab. Bandung	1.086.282.210.000
158.	Kab. Bekasi	536.786.256.000
159.	Kab. Bogor	1.115.703.641.000
160.	Kab. Ciamis	867.400.725.000
161.	Kab. Cianjur	877.993.919.000
162.	Kab. Cirebon	867.300.289.000
163.	Kab. Garut	1.031.869.766.000
164.	Kab. Indramayu	624.422.201.000
165.	Kab. Karawang	714.360.098.000
166.	Kab. Kuningan	660.391.147.000

167. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	DAERAH	JUMLAH
167.	Kab. Majalengka	649.631.581.000
168.	Kab. Purwakarta	457.287.567.000
169.	Kab. Subang	666.116.693.000
170.	Kab. Sukabumi	871.927.247.000
171.	Kab. Sumedang	634.169.767.000
172.	Kab. Tasikmalaya	805.517.712.000
173.	Kota Bandung	912.571.834.000
174.	Kota Bekasi	647.082.121.000
175.	Kota Bogor	426.093.607.000
176.	Kota Cirebon	365.005.210.000
177.	Kota Depok	461.602.957.000
178.	Kota Sukabumi	289.801.514.000
179.	Kota Cimahi	333.439.320.000
180.	Kota Tasikmalaya	426.764.264.000
181.	Kota Banjar	217.383.597.000
182.	Kab. Bandung Barat	584.624.959.000
183.	Provinsi Banten	381.979.019.000
184.	Kab. Lebak	606.473.491.000
185.	Kab. Pandeglang	630.726.936.000
186.	Kab. Serang	554.223.373.000
187.	Kab. Tangerang	827.846.151.000
188.	Kota Cilegon	279.127.685.000
189.	Kota Tangerang	458.041.892.000
190.	Kota Serang	315.997.942.000
191.	Provinsi Jawa Tengah	1.168.787.757.000
192.	Kab. Banjarnegara	506.783.177.000
193.	Kab. Banyumas	720.191.173.000
194.	Kab. Batang	414.493.766.000

195. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	DAERAH	JUMLAH
195.	Kab. Blora	487.917.464.000
196.	Kab. Boyolali	587.574.192.000
197.	Kab. Brebes	738.270.368.000
198.	Kab. Cilacap	793.266.735.000
199.	Kab. Demak	493.497.333.000
200.	Kab. Grobogan	617.827.183.000
201.	Kab. Jepara	529.580.873.000
202.	Kab. Karanganyar	520.919.106.000
203.	Kab. Kebumen	642.797.600.000
204.	Kab. Kendal	520.676.886.000
205.	Kab. Klaten	726.234.465.000
206.	Kab. Kudus	463.012.580.000
207.	Kab. Magelang	604.521.811.000
208.	Kab. Pati	620.576.636.000
209.	Kab. Pekalongan	490.039.078.000
210.	Kab. Pemasang	619.895.592.000
211.	Kab. Purbalingga	464.788.521.000
212.	Kab. Purworejo	528.061.281.000
213.	Kab. Rembang	411.434.996.000
214.	Kab. Semarang	508.915.019.000
215.	Kab. Sragen	561.675.090.000
216.	Kab. Sukoharjo	516.588.118.000
217.	Kab. Tegal	640.042.082.000
218.	Kab. Temanggung	438.090.923.000
219.	Kab. Wonogiri	616.996.009.000
220.	Kab. Wonosobo	442.370.077.000
221.	Kota Magelang	260.112.799.000
222.	Kota Pekalongan	266.792.669.000
223.	Kota Salatiga	238.069.009.000
224.	Kota Semarang	640.186.272.000

225. Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	DAERAH	JUMLAH
225.	Kota Surakarta	428.248.927.000
226.	Kota Tegal	244.580.618.000
227.	Provinsi DI Yogyakarta	527.471.247.000
228.	Kab. Bantul	573.512.337.000
229.	Kab. Gunung Kidul	521.293.704.000
230.	Kab. Kulon Progo	411.293.618.000
231.	Kab. Sleman	563.320.892.000
232.	Kota Yogyakarta	395.444.062.000
233.	Provinsi Jawa Timur	1.212.934.765.000
234.	Kab. Bangkalan	497.593.900.000
235.	Kab. Banyuwangi	761.897.082.000
236.	Kab. Blitar	639.739.427.000
237.	Kab. Bojonegoro	583.763.532.000
238.	Kab. Bondowoso	479.819.794.000
239.	Kab. Gresik	513.481.870.000
240.	Kab. Jember	955.007.373.000
241.	Kab. Jombang	606.942.500.000
242.	Kab. Kediri	693.062.072.000
243.	Kab. Lamongan	606.700.000.000
244.	Kab. Lumajang	557.172.733.000
245.	Kab. Madiun	476.031.395.000
246.	Kab. Magetan	503.707.903.000
247.	Kab. Malang	967.107.349.000
248.	Kab. Mojokerto	529.761.802.000
249.	Kab. Nganjuk	598.046.354.000
250.	Kab. Ngawi	572.965.157.000
251.	Kab. Pacitan	435.690.795.000
252.	Kab. Pamekasan	475.711.035.000

253. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	DAERAH	JUMLAH
253.	Kab. Pasuruan	636.119.395.000
254.	Kab. Ponorogo	563.867.637.000
255.	Kab. Probolinggo	568.850.488.000
256.	Kab. Sampang	454.853.945.000
257.	Kab. Sidoarjo	666.336.274.000
258.	Kab. Situbondo	447.609.618.000
259.	Kab. Sumenep	580.851.656.000
260.	Kab. Trenggalek	472.359.819.000
261.	Kab. Tuban	541.454.144.000
262.	Kab. Tulungagung	648.991.116.000
263.	Kota Blitar	223.964.245.000
264.	Kota Kediri	421.789.650.000
265.	Kota Madiun	271.396.486.000
266.	Kota Malang	494.910.987.000
267.	Kota Mojokerto	244.969.563.000
268.	Kota Pasuruan	231.964.161.000
269.	Kota Probolinggo	268.392.765.000
270.	Kota Surabaya	652.532.472.000
271.	Kota Batu	232.146.405.000
272.	Provinsi Kalimantan Barat	755.123.093.000
273.	Kab. Bengkayang	295.931.543.000
274.	Kab. Landak	358.090.492.000
275.	Kab. Kapuas Hulu	537.348.225.000
276.	Kab. Ketapang	608.067.401.000
277.	Kab. Pontianak	313.155.439.000
278.	Kab. Sambas	463.406.160.000
279.	Kab. Sanggau	444.197.737.000
280.	Kab. Sintang	490.697.841.000
281.	Kota Pontianak	408.180.404.000

282. Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	DAERAH	JUMLAH
282.	Kota Singkawang	269.526.606.000
283.	Kab. Sekadau	253.937.101.000
284.	Kab. Melawi	288.933.942.000
285.	Kab. Kayong Utara	218.278.970.000
286.	Kab. Kubu Raya	414.760.167.000
287.	Provinsi Kalimantan Tengah	707.880.493.000
288.	Kab. Barito Selatan	332.356.460.000
289.	Kab. Barito Utara	315.450.170.000
290.	Kab. Kapuas	503.442.055.000
291.	Kab. Kotawaringin Barat	373.253.639.000
292.	Kab. Kotawaringin Timur	459.745.862.000
293.	Kota Palangkaraya	341.320.280.000
294.	Kab. Barito Timur	271.849.384.000
295.	Kab. Murung Raya	391.801.263.000
296.	Kab. Pulang Pisau	307.832.456.000
297.	Kab. Gunung Mas	312.107.445.000
298.	Kab. Lamandau	257.428.838.000
299.	Kab. Sukamara	259.830.459.000
300.	Kab. Katingan	398.716.616.000
301.	Kab. Seruyan	360.740.638.000
302.	Provinsi Kalimantan Selatan	458.074.767.000
303.	Kab. Banjar	374.539.635.000
304.	Kab. Barito Kuala	312.641.995.000
305.	Kab. Hulu Sungai Selatan	287.558.453.000
306.	Kab. Hulu Sungai Tengah	291.732.438.000
307.	Kab. Hulu Sungai Utara	251.160.028.000
308.	Kab. Kotabaru	332.777.110.000
309.	Kab. Tabalong	269.423.900.000

310. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	DAERAH	JUMLAH
310.	Kab. Tanah Laut	280.546.736.000
311.	Kab. Tapin	246.451.507.000
312.	Kota Banjarbaru	222.250.092.000
313.	Kota Banjarmasin	402.021.456.000
314.	Kab. Balangan	192.470.591.000
315.	Kab. Tanah Bumbu	245.652.285.000
316.	Provinsi Kalimantan Timur	-
317.	Kab. Berau	160.319.274.000
318.	Kab. Bulungan	75.015.548.000
319.	Kab. Kutai Kartanegara	-
320.	Kab. Kutai Barat	252.246.051.000
321.	Kab. Kutai Timur	68.978.701.000
322.	Kab. Malinau	312.144.289.000
323.	Kab. Nunukan	44.724.927.000
324.	Kab. Paser	25.256.525.000
325.	Kota Balikpapan	76.988.322.000
326.	Kota Bontang	-
327.	Kota Samarinda	180.819.152.000
328.	Kota Tarakan	-
329.	Kab. Penajam Paser Utara	-
330.	Kab. Tana Tidung	218.453.383.000
331.	Provinsi Sulawesi Utara	558.781.013.000
332.	Kab. Bolaang Mongondow	295.799.864.000
333.	Kab. Minahasa	374.743.606.000
334.	Kab. Sangihe	286.315.172.000
335.	Kota Bitung	274.296.139.000
336.	Kota Manado	420.481.311.000
337.	Kab. Kepulauan Talaud	256.907.753.000

338. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	DAERAH	JUMLAH
338.	Kab. Minahasa Selatan	289.948.951.000
339.	Kota Tomohon	219.721.446.000
340.	Kab. Minahasa Utara	266.587.183.000
341.	Kota Kotamobagu	201.553.153.000
342.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	208.126.844.000
343.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	222.677.831.000
344.	Kab. Minahasa Tenggara	220.928.849.000
345.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	161.163.767.000
346.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	176.192.095.000
347.	Provinsi Gorontalo	400.750.820.000
348.	Kab. Boalemo	218.555.321.000
349.	Kab. Gorontalo	338.845.034.000
350.	Kota Gorontalo	264.392.757.000
351.	Kab. Pohuwato	251.573.211.000
352.	Kab. Bone Bolango	240.131.053.000
353.	Kab. Gorontalo Utara	185.019.294.000
354.	Provinsi Sulawesi Tengah	659.331.271.000
355.	Kab. Banggai	452.939.545.000
356.	Kab. Banggai Kepulauan	263.640.125.000
357.	Kab. Buol	294.392.630.000
358.	Kab. Toli-Toli	319.134.358.000
359.	Kab. Donggala	351.934.720.000
360.	Kab. Morowali	393.928.690.000
361.	Kab. Poso	387.195.137.000
362.	Kota Palu	380.493.015.000
363.	Kab. Parigi Moutong	384.004.987.000
364.	Kab. Tojo Una Una	273.095.484.000
365.	Kab. Sigi	329.604.056.000

366. Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	DAERAH	JUMLAH
366.	Provinsi Sulawesi Selatan	706.276.399.000
367.	Kab. Bantaeng	235.865.974.000
368.	Kab. Barru	265.533.877.000
369.	Kab. Bone	541.715.851.000
370.	Kab. Bulukumba	383.218.545.000
371.	Kab. Enrekang	266.105.385.000
372.	Kab. Gowa	431.084.713.000
373.	Kab. Jeneponto	314.827.177.000
374.	Kab. Luwu	342.641.953.000
375.	Kab. Luwu Utara	343.114.194.000
376.	Kab. Maros	325.251.145.000
377.	Kab. Pangkajene Kepulauan	350.721.615.000
378.	Kab. Pinrang	365.266.099.000
379.	Kab. Kepulauan Selayar	259.174.593.000
380.	Kab. Sidenreng Rappang	318.263.590.000
381.	Kab. Sinjai	295.531.515.000
382.	Kab. Soppeng	332.095.212.000
383.	Kab. Takalar	304.060.484.000
384.	Kab. Tana Toraja	297.364.598.000
385.	Kab. Wajo	364.822.715.000
386.	Kota Pare-pare	242.415.481.000
387.	Kota Makassar	644.266.427.000
388.	Kota Palopo	258.180.337.000
389.	Kab. Luwu Timur	238.661.722.000
390.	Kab. Toraja Utara	249.411.921.000
391.	Provinsi Sulawesi Barat	405.749.577.000
392.	Kab. Majene	262.008.961.000
393.	Kab. Mamuju	383.109.836.000
394.	Kab. Polewali Mandar	351.260.683.000

395. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	DAERAH	JUMLAH
395.	Kab. Mamasa	244.088.686.000
396.	Kab. Mamuju Utara	208.690.081.000
397.	Provinsi Sulawesi Tenggara	595.762.419.000
398.	Kab. Buton	360.126.200.000
399.	Kab. Konawe	413.797.158.000
400.	Kab. Kolaka	342.382.945.000
401.	Kab. Muna	406.233.024.000
402.	Kota Kendari	345.765.495.000
403.	Kota Bau-bau	274.998.063.000
404.	Kab. Konawe Selatan	355.904.364.000
405.	Kab. Bombana	241.092.399.000
406.	Kab. Wakatobi	209.835.658.000
407.	Kab. Kolaka Utara	244.821.224.000
408.	Kab. Konawe Utara	264.986.159.000
409.	Kab. Buton Utara	218.076.514.000
410.	Provinsi Bali	489.942.535.000
411.	Kab. Badung	131.919.568.000
412.	Kab. Bangli	292.695.476.000
413.	Kab. Buleleng	512.748.214.000
414.	Kab. Gianyar	387.493.486.000
415.	Kab. Jembrana	308.567.032.000
416.	Kab. Karangasem	374.537.064.000
417.	Kab. Klungkung	285.662.095.000
418.	Kab. Tabanan	429.919.452.000
419.	Kota Denpasar	336.125.552.000
420.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	573.406.755.000
421.	Kab. Bima	449.582.361.000
422.	Kab. Dompu	311.256.725.000

423. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	DAERAH	JUMLAH
423.	Kab. Lombok Barat	409.929.312.000
424.	Kab. Lombok Tengah	534.642.120.000
425.	Kab. Lombok Timur	619.205.970.000
426.	Kab. Sumbawa	436.347.143.000
427.	Kota Mataram	328.201.558.000
428.	Kota Bima	246.392.786.000
429.	Kab. Sumbawa Barat	181.740.339.000
430.	Kab. Lombok Utara	229.576.967.000
431.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	674.635.569.000
432.	Kab. Alor	299.323.003.000
433.	Kab. Belu	398.283.809.000
434.	Kab. Ende	332.008.323.000
435.	Kab. Flores Timur	313.638.878.000
436.	Kab. Kupang	404.636.274.000
437.	Kab. Lembata	235.657.505.000
438.	Kab. Manggarai	299.504.443.000
439.	Kab. Ngada	247.395.204.000
440.	Kab. Sikka	318.206.009.000
441.	Kab. Sumba Barat	223.473.354.000
442.	Kab. Sumba Timur	337.455.581.000
443.	Kab. Timor Tengah Selatan	404.411.568.000
444.	Kab. Timor Tengah Utara	296.283.467.000
445.	Kota Kupang	340.862.396.000
446.	Kab. Rote Ndao	209.801.933.000
447.	Kab. Manggarai Barat	254.249.660.000
448.	Kab. Nagekeo	223.480.632.000
449.	Kab. Sumba Barat Daya	238.819.451.000
450.	Kab. Sumba Tengah	181.653.112.000
451.	Kab. Manggarai Timur	252.113.646.000

452. Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	DAERAH	JUMLAH
452.	Provinsi Maluku	607.572.176.000
453.	Kab. Maluku Tenggara Barat	287.098.118.000
454.	Kab. Maluku Tengah	464.200.684.000
455.	Kab. Maluku Tenggara	243.672.026.000
456.	Kab. Buru	239.984.788.000
457.	Kota Ambon	365.671.477.000
458.	Kab. Seram Bagian Barat	274.790.210.000
459.	Kab. Seram Bagian Timur	214.695.338.000
460.	Kab. Kepulauan Aru	271.811.328.000
461.	Kota Tual	181.704.979.000
462.	Kab. Buru Selatan	198.889.373.000
463.	Kab. Maluku Barat Daya	264.497.720.000
464.	Provinsi Maluku Utara	479.726.664.000
465.	Kab. Halmahera Tengah	222.738.003.000
466.	Kab. Halmahera Barat	234.754.970.000
467.	Kota Ternate	281.284.868.000
468.	Kab. Halmahera Timur	208.115.495.000
469.	Kota Tidore Kepulauan	262.423.165.000
470.	Kab. Kepulauan Sula	236.361.472.000
471.	Kab. Halmahera Selatan	304.643.975.000
472.	Kab. Halmahera Utara	283.484.423.000
473.	Provinsi Papua	1.148.740.891.000
474.	Kab. Biak Numfor	321.585.402.000
475.	Kab. Jayapura	378.367.180.000
476.	Kab. Jayawijaya	387.415.678.000
477.	Kab. Merauke	702.758.416.000
478.	Kab. Mimika	238.910.861.000
479.	Kab. Nabire	386.381.732.000

480. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	DAERAH	JUMLAH
480.	Kab. Paniai	388.439.097.000
481.	Kab. Puncak Jaya	381.412.863.000
482.	Kab. Kepulauan Yapen	274.553.158.000
483.	Kota Jayapura	348.019.340.000
484.	Kab. Sarmi	407.210.610.000
485.	Kab. Keerom	296.672.885.000
486.	Kab. Yahukimo	403.468.127.000
487.	Kab. Pegunungan Bintang	461.669.822.000
488.	Kab. Tolikara	333.298.523.000
489.	Kab. Boven Digoel	499.671.438.000
490.	Kab. Mappi	429.031.692.000
491.	Kab. Asmat	534.326.328.000
492.	Kab. Waropen	312.239.060.000
493.	Kab. Supiori	274.408.784.000
494.	Kab. Mamberamo Raya	391.523.731.000
495.	Kab. Mamberamo Tengah	276.866.443.000
496.	Kab. Yalimo	286.648.768.000
497.	Kab. Lanny Jaya	301.567.179.000
498.	Kab. Nduga	278.924.970.000
499.	Kab. Puncak	433.520.045.000
500.	Kab. Dogiyai	242.073.906.000
501.	Provinsi Papua Barat	605.915.614.000
502.	Kab. Sorong	300.030.467.000
503.	Kab. Manokwari	390.174.164.000
504.	Kab. Fak Fak	358.622.917.000
505.	Kota Sorong	238.203.839.000
506.	Kab. Sorong Selatan	273.541.356.000
507.	Kab. Raja Ampat	314.195.707.000
508.	Kab. Teluk Bintuni	324.025.716.000

509. Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	DAERAH	JUMLAH
509.	Kab. Teluk Wondama	236.895.803.000
510.	Kab. Kaimana	346.855.313.000
	Total Provinsi	19.249.034.200.000
	Total Kabupaten/Kota	173.241.307.800.000
	Total Nasional	192.490.342.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

